

**DAMPAK *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR)
TERHADAP TINGKAT KESEHATAN
KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DINAS
PERHUBUNGAN DAN LLAJ PROVINSI JAWA TIMUR DI
SURABAYA**

ARTIKEL ILMIAH



DHANY DANHUDI

2008310335

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
2013**

**DAMPAK CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) TERHADAP
TINGKAT KESEHATAN KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
DINAS PERHUBUNGAN DAN LLAJ PROVINSI JAWA TIMUR
DI SURABAYA**

ARTIKEL ILMIAH



Oleh :

DHANY DANHUDI

2008310335

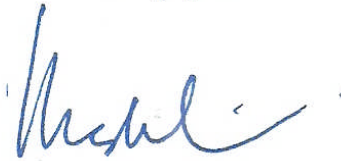
**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS
SURABAYA
2013**

PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Dhany Danhudi
Tempat, Tanggal Lahir : Kupang, 24 April 1990
N.I.M : 2008 310 335
Jurusan : Akuntansi
Program Pendidikan : Strata 1
Konsentrasi : Akuntansi Manajemen
Judul : Dampak *Corporate Social Responsibility* (CSR) Terhadap Tingkat Kesehatan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur di Surabaya

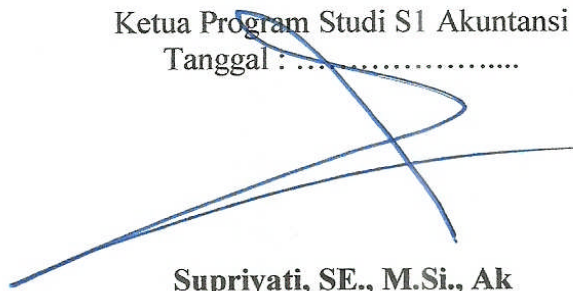
Disetujui dan diterima baik oleh :

Dosen Pembimbing
Tanggal : ...30/4/13...



Dra. Gunasti Hudiwinarsih, Ak., M.Si.

Ketua Program Studi S1 Akuntansi
Tanggal :



Supriyati, SE., M.Si., Ak

DAMPAK CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) TERHADAP TINGKAT KESEHATAN KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA DINAS PERHUBUNGAN DAN LLAJ PROVINSI JAWA TIMUR DI SURABAYA

Dhany Danhudi
STIE Perbanas Surabaya
Email : 2008310335@students.perbanas.ac.id
Jl. Nginden Semolo 34-36 Surabaya

ABSTRACT

The program is the participation of state governments in an effort to improve the ability of small businesses to be resilient and self-reliant through the use of funds from the profits of SOEs is given in the form of working capital loans. Opportunities capital provided by the government has been utilized by official cooperation of the Republic of Indonesia (KPRI) Department of Transportation and LLAJ East Java Province. Employees Cooperative Republic of Indonesia (KPRI) Department of Transportation and LLAJ East Java province still do not know the impact of CSR on the health of the cooperative, this study aims to determine the soundness of official cooperation of the Republic of Indonesia Department of Transportation and LLAJ Surabaya province before and after the administration CSR CSR. With descriptive quantitative testing conducted by the results of the whole component and based on the predicate level health impact of CSR on the health of the Department of Transportation and LLAJ KPRI Surabaya is no impact because both before and after delivery of health co-operatives CSR levels are at the title of "Fit". Impact of CSR on the level of health provision KPRI LLAJ Surabaya Transportation Department and can be seen from the increase in capital ratio is the ratio of equity capital to total assets can be seen in a more cooperative SHU up, and the ratio of the management of the planning of long-term employment after the grant of CSR .

Key words : *The Level Health, KPRI Department Of Transportation And LLAJ East Java Province In Surabaya, Corporate Social Responsibility, Impact.*

PENDAHULUAN

Koperasi merupakan salah satu kekuatan ekonomi yang mendorong tumbuhnya perekonomian nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, “koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”. Sebagai badan usaha, koperasi adalah sebuah perusahaan yang harus mampu berdiri sendiri menjalankan kegiatan usahanya untuk memperoleh laba. Hanya saja perkoperasian Indonesia tidak mengenal istilah “laba”, karena tujuan

kegiatan koperasi tidak berorientasi pada laba (*benefit oriented*). Laba dalam koperasi dikenal dengan istilah Sisa Hasil Usaha (SHU). Pada setiap akhir periode operasinya, koperasi diharapkan dapat menghasilkan SHU yang layak. Pada dasarnya koperasi dikelola dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan para anggotanya dan masyarakat secara keseluruhan. Sekalipun koperasi tidak mengutamakan keuntungan, usaha-usaha yang dikelola oleh koperasi harus memperoleh SHU yang layak sehingga koperasi dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya dan meningkatkan kemampuan usaha. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, seringkali koperasi

menghadapi beberapa kendala/permasalahan diantaranya modal usaha. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah guna mengatasi permasalahan ini, diantaranya melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Peluang bantuan modal yang diberikan oleh pemerintah tersebut telah dimanfaatkan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur. Namun dengan adanya pemberian modal tersebut Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur masih belum mengetahui dampaknya pada tingkat kesehatan koperasi sehubungan dengan hal tersebut, maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui dampak dari CSR terhadap tingkat kesehatan KPRI.

LANDASAN TEORI DAN RERANGKA PEMIKIRAN

Unit Simpan Pinjam

Pengertian Unit Simpan Pinjam menurut Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 96/Kep/M.KUKM/IX/2004 adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan yang selanjutnya disebut USP.

Aspek-aspek Kesehatan USP

1. Permodalan

Modal unit simpan pinjam berupa modal tetap dan modal tidak tetap. Modal tetap yang dimaksud meliputi modal yang disetorkan pada awal pendirian, modal tambah dari koperasi yang bersangkutan, dan cadangan yang disisihkan dari keuntungan koperasi.

2. Kualitas Aktiva Produktif

Aktiva yang produktif sering juga disebut *earning asset* atau aktiva yang menghasilkan, karena penempatan dana tersebut untuk mencapai tingkat penghasilan yang diharapkan. Aktiva produktif adalah kekayaan koperasi yang mendatangkan penghasilan bagi koperasi

yang bersangkutan (Anes Asnandar, 2007:15).

3. Manajemen

Pada dasarnya manajemen koperasi tidak jauh berbeda dengan manajemen perusahaan industri manufaktur, perdagangan, dan perusahaan non bank yang lain.

Penilaian aspek manajemen USP koperasi meliputi lima (5) komponen yakni: manajemen umum, kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen aktiva, dan manajemen likuiditas.

1. Efisiensi

Penilaian efisiensi USP koperasi didasarkan pada tiga (3) rasio yaitu:

1. Rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto.
2. Rasio aktiva terhadap total asset.
3. Rasio efisiensi pelayanan.

Rasio-rasio di atas menggambarkan sampai seberapa besar USP koperasi mampu memberikan pelayanan yang efisien kepada anggotanya dari penggunaan asset yang dimilikinya.

5. Likuiditas

Masalah likuiditas berhubungan dengan masalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang harus segera dipenuhi. Dalam hal ini adalah kemampuan koperasi untuk memenuhi kewajiban jangka pendek.

Kas dan bank adalah alat likuid yang dapat segera digunakan, seperti uang tunai dan uang yang tersimpan pada lembaga keuangan lain.

6. Kemandirian dan Pertumbuhan

Penilaian terhadap kemandirian dan pertumbuhan didasarkan pada tiga (3) rasio, yaitu rentabilitas aset, rentabilitas ekuitas, dan kemandirian operasional.

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM Nomor:14/Per/M.KUKM/XII/2009.

Rentabilitas sendiri adalah kemampuan USP untuk memperoleh sisa hasil usaha.

7. Jatidiri Koperasi

Penilaian aspek jatidiri koperasi dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya, yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Aspek penilaian jati diri koperasi menggunakan dua (2) rasio, yaitu:

1. Rasio Partisipasi Bruto
Rasio partisipasi bruto adalah tingkat kemampuan koperasi dalam melayani anggota, semakin tinggi atau besar persentasenya semakin baik. Partisipasi bruto adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa pada anggota yang mencakup beban pokok dan partisipasi netto.
2. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

Rasio ini mengukur kemampuan koperasi memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan wajib, semakin tinggi persentasenya semakin baik.

Corporate Social Responsibility (CSR)

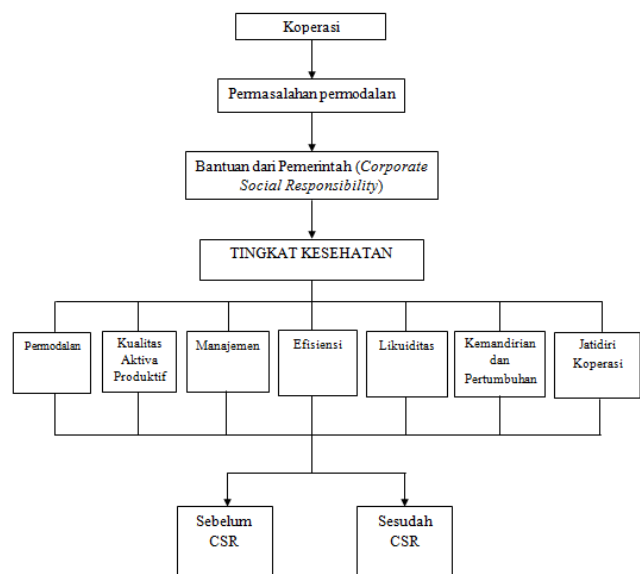
Menurut Idris (2005), CSR yang dijalankan oleh suatu perusahaan seharusnya tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line*, yaitu nilai perusahaan (*corporate value*) yang hanya direfleksikan dalam kondisi keuangan atau finansialnya saja, melainkan tanggung jawab perusahaan harus berpijak pada *triple bottom line*, yaitu selain finansial juga sosial dan lingkungan, karena kondisi keuangan saja tidak cukup menjamin perusahaan tumbuh secara berkelanjutan (*sustainable*). Keberlanjutan perusahaan hanya akan terjamin apabila, perusahaan memperhatikan dimensi sosial dan lingkungan hidup.

CSR dalam BUMN

Menurut Undang-Undang No. 19 tahun 2003 sebagai ketentuan perundangan terbaru mengenai BUMN, maka dikenal dua bentuk badan usaha milik negara yaitu perusahaan

perseroan (Persero) dan perusahaan umum (Perum). Persero merupakan bentuk BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki negara dan bertujuan utama untuk mencari keuntungan. Perum merupakan BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa sekaligus mengejar keuntungan.

Terkait dengan tanggung jawab sosialnya, maka peran sosial BUMN antara lain dituangkan melalui keputusan Menteri BUMN Nomor: Kep236/MBU/2003. Dalam keputusan tersebut dinyatakan bahwa dalam rangka mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan serta terciptanya pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja, kesempatan berusaha dan pemberdayaan masyarakat, perlu ditingkatkan partisipasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk memberdayakan dan mengembangkan kondisi ekonomi, kondisi sosial masyarakat dan sekitarnya, melalui Program Kemitraan BUMN dengan usaha kecil dan Program Bina Lingkungan.



Gambar 1
Rerangka Pemikiran

Dari kerangka pemikiran diatas, maka bisa dijelaskan bahwa koperasi seringkali menghadapi beberapa kendala/permasalahan diantaranya adalah permasalahan permodalan. Permasalahan permodalan tersebut telah ditangani oleh pemerintah dengan memberikan bantuan dana melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR) / Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

Bantuan dana CSR yang diberikan oleh pemerintah akan diukur akan diukur menggunakan tingkat kesehatan pada Unit Simpan Pinjam melalui aspek Permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, jatidiri koperasi. Tolak ukur kesehatan tersebut pada sebelum koperasi menerima dana CSR dan sesudah koperasi menerima dana CSR, sehingga dapat diketahui apakah bantuan dana CSR tersebut mempunyai dampak atau tidak pada tingkat kesehatan koperasi.

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian Deskriptif Kuantitatif. Penelitian Deskriptif merupakan dasar bagi semua penelitian. Penelitian Deskriptif dapat dilakukan dengan analisa kuantitatif. “Dengan analisa kuantitatif akan diperoleh gambaran sistematis mengenai isi suatu dokumen. Dokumen tersebut diteliti isinya, kemudian diklasifikasi menurut kriteria atau pola tertentu, dan dianalisa atau dinilai” (Winarno, 1990 : 145).

Jenis Data dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dari proposal skripsi ini adalah:

1. Data Primer

Merupakan data utama penelitian yang diperoleh dari hasil pengamatan dan wawancara langsung dengan pihak-pihak yang berkaitan dalam koperasi dan observasi mengenai aktivitas yang berkaitan dengan upaya-upaya yang dilakukan koperasi dalam meningkatkan sisa hasil usahanya.

Sumber data primer adalah penarikan kesimpulan dari hasil wawancara yang dilakukan dengan karyawan koperasi keuangan, pimpinan koperasi, dan anggota koperasi.

2. Data Sekunder

Merupakan data dari sumber tertulis, baik dari buku-buku teori dan literatur maupun dokumen-dokumen serta laporan-laporan yang dikeluarkan oleh organisasi yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan dengan baik. Sumber data sekunder adalah buku-buku teori yang berkaitan dengan topik penelitian dan data Laporan Keuangan yang dikeluarkan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia Dinas Perhubungan.

Teknik Analisis

Pada tahap analisis ini setelah semua data berhasil dikumpulkan, maka akan dilakukan pendokumentasian. Dari data tersebut maka akan dilakukan analisis sebagai berikut :

1. Dari hasil observasi dan wawancara didokumentasikan dalam bentuk tulisan terlebih dahulu sebelum dilakukan analisis.
2. Menghitung rasio-rasio variabel Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Kemandirian dan Pertumbuhan, serta Jatidiri Koperasi merujuk pada Laporan Keuangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Dinas Perhubungan Periode 2006-2010.

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

1. Rasio Permodalan

a. Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Asset

Tahun	Nilai	Bobot	Skor
2006	25	6%	1,5
2007	25	6%	1,5
2008	50	6%	3
2009	50	6%	3
2010	50	6%	3

Sumber : Data Keuangan Koperasi KPRI Dishub dan LLAJ

Dapat dilihat pada tabel diatas memberikan gambaran secara jelas bahwa pada tahun 2006 dan 2007 yaitu pada saat sebelum pemberian CSR mendapatkan skor rendah, hal ini dikarenakan perbandingan antara total modal sendiri dengan total asset masih diatas 90% sehingga mendapatkan skor rendah. Pada tahun 2008 yaitu pada saat pemberian CSR mengalami kenaikan skor, hal ini dikarenakan total asset pada tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan modal sendiri. Pada tahun 2009 dan 2010 yaitu pada saat sesudah pemberian CSR memiliki skor yang sama dengan tahun 2008, pada tahun 2009 dan 2010 perbandingan antara total modal sendiri dengan total asset mengalami peningkatan namun tidak mempengaruhi hasil skor.

b. Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko

Tahun	Nilai	Bobot	Skor
2006	100	6%	6
2007	100	6%	6
2008	100	6%	6
2009	100	6%	6
2010	100	6%	6

Sumber : Data Keuangan Koperasi KPRI Dishub dan LLAJ

Dapat dilihat pada tabel diatas memberikan gambaran secara jelas bahwa tidak adanya perbedaan antara sebelum, pada saat, dan sesudah pemberian CSR. Hal ini dikarenakan pada KPRI Dinas Perhubungan dan

LLAJ Surabaya tidak memiliki pinjaman yang diberikan yang berisiko sehingga perbandingan antara modal sendiri dengan pinjaman diberikan berisiko dinilai sebesar 100%.

c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri

Tahun	Nilai	Bobot	Skor
2006	100	3%	3
2007	100	3%	3
2008	100	3%	3
2009	100	3%	3
2010	100	3%	3

Sumber : Data Keuangan Koperasi KPRI Dishub dan LLAJ

Dapat dilihat pada tabel diatas memberikan gambaran secara jelas bahwa tidak adanya perbedaan antara sebelum, pada saat, dan sesudah pemberian CSR. Hal ini dikarenakan perbandingan antara modal sendiri tertimbang dengan aktiva tertimbang menurut resiko lebih dari 100%.

2. Rasio Kualitas Ativa Produktif

a. Rasio Volume Pinjaman Pada Anggota Terhadap Volume Pinjaman Diberikan

Tahun	Nilai	Bobot	Skor
2006	100	10%	10
2007	100	10%	10
2008	100	10%	10
2009	100	10%	10
2010	100	10%	10

Sumber : Data Keuangan Koperasi KPRI Dishub dan LLAJ

Dapat dilihat pada tabel diatas memberikan gambaran secara jelas bahwa tidak adanya perbedaan antara sebelum, pada saat, dan sesudah pemberian CSR. Hal ini dikarenakan perbandingan antara volume pinjaman pada anggota dengan volume pinjaman yang diberikan adalah sama (100%).

b. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman yang Diberikan

Tahun	Nilai	Bobot	Skor
2006	100	5%	5
2007	100	5%	5
2008	100	5%	5
2009	100	5%	5
2010	100	5%	5

Sumber : Data Keuangan Koperasi KPRI Dishub dan LLAJ

Dapat dilihat pada tabel diatas memberikan gambaran secara jelas bahwa tidak adanya perbedaan antara sebelum, pada saat, dan sesudah pemberian CSR. Hal ini dikarenakan KPRI Dinas Perhubungan dan LLAJ Surabaya tidak memiliki pinjaman bermasalah jadi perbandingan antara pinjaman bermasalah dengan pinjaman yang diberikan sebesar 0%. Pada rasio ini semakin kecil atau sama dengan (nol) maka semakin besar skor yang diperoleh.

c. Rasio Cadangan Risiko Terhadap Pinjaman Bermasalah

Tahun	Nilai	Bobot	Skor
2006	100	5%	5
2007	100	5%	5
2008	100	5%	5
2009	100	5%	5
2010	100	5%	5

Sumber : Data Keuangan Koperasi KPRI Dishub dan LLAJ

Dapat dilihat pada tabel diatas memberikan gambaran secara jelas bahwa tidak adanya perbedaan antara sebelum, pada saat, dan sesudah pemberian CSR. Hal ini dikarenakan pada KPRI Dinas Perhubungan dan LLAJ Surabaya tidak memiliki pinjaman bermasalah sehingga perbandingan antara cadangan risiko

dengan pinjaman bermasalah dinilai sebesar 100%.

d. Rasio Pinjaman yang Berisiko Terhadap Pinjaman yang Diberikan

Tahun	Nilai	Bobot	Skor
2006	100	5%	5
2007	100	5%	5
2008	100	5%	5
2009	100	5%	5
2010	100	5%	5

Sumber : Data Keuangan Koperasi KPRI Dishub dan LLAJ

Dapat dilihat pada tabel diatas memberikan gambaran secara jelas bahwa tidak adanya perbedaan antara sebelum, pada saat, dan sesudah pemberian CSR. Hal ini dikarenakan pada KPRI Dinas Perhubungan dan LLAJ Surabaya tidak memiliki pinjaman berisiko sehingga perbandingan antara pinjaman berisiko dengan pinjaman yang diberikan sebesar 0%. Pada rasio ini semakin kecil atau sama dengan (nol) maka semakin besar skor yang diperoleh.

3. Rasio Manajemen

No.	Point	Skor				
		2006	2007	2008	2009	2010
a.	Manajemen Umum	2,25	2,25	2,25	3	3
b.	Kelembagaan	3	3	3	3	3
c.	Manajemen Permodalan	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
d.	Manajemen Aktiva	1,8	1,8	1,8	1,8	1,8
e.	Manajemen Likuiditas	3	3	3	3	3
	TOTAL	11,25	11,25	11,25	12	12

Sumber : Data Keuangan Koperasi KPRI Dishub dan LLAJ

Dapat dilihat pada tabel diatas memberikan gambaran secara jelas bahwa pada tahun 2006, 2007, dan 2008 yaitu pada sebelum dan pada saat pemberian CSR mendapatkan

skor yang cukup. Hal ini dikarenakan pada manajemen umum, permodalan dan aktiva masih ada beberapa pertanyaan yang memiliki jawaban tidak, sehingga bermakna masih ada yang belum diimplementasikan. Pada tahun 2009 dan 2010 yaitu pada saat sesudah pemberian CSR mengalami kenaikan skor, hal ini dikarenakan terdapat peningkatan implementasi dari unsur manajemen umum sehingga diperoleh peningkatan pada total skor. Untuk bagian permodalan dan aktiva masih memiliki skor yang sama dengan tahun sebelumnya.

4. Rasio Efisiensi

a. Rasio Beban Operasi Anggota Terhadap Partisipasi Bruto

Tahun	Nilai	Bobot	Skor
2006	100	4%	4
2007	100	4%	4
2008	100	4%	4
2009	100	4%	4
2010	100	4%	4

Sumber : Data Keuangan Koperasi KPRI Dishub dan LLAJ

Dapat dilihat pada tabel diatas memberikan gambaran secara jelas bahwa tidak adanya perbedaan antara sebelum, pada saat, dan sesudah pemberian CSR. Hal ini dikarenakan perbandingan antara beban operasi anggota dengan partisipasi bruto tidak mencapai diatas 90%. Pada rasio ini semakin kecil perbandingan maka semakin besar skor yang didapat.

b. Rasio Beban Usaha Terhadap SHU Kotor

Tahun	Nilai	Bobot	Skor
2006	100	4%	4
2007	25	4%	1
2008	25	4%	1
2009	25	4%	1
2010	25	4%	1

Sumber : Data Keuangan Koperasi KPRI Dishub dan LLAJ

Dapat dilihat pada tabel diatas memberikan gambaran secara jelas bahwa pada tahun 2006 yaitu pada saat sebelum pemberian CSR mendapatkan skor yang tinggi namun pada tahun 2007 mengalami penurunan skor. Hal ini dikarenakan perbandingan antara beban usaha dengan SHU kotor pada tahun 2006 lebih kecil dari 40% sedangkan tahun 2007 mengalami kenaikan perbandingan antara beban usaha dengan SHU kotor sebesar 100%, begitu juga tahun 2008 pada saat pemberian CSR, Tahun 2009 dan 2010 pada saat sesudah pemberian CSR. Perbandingan pada tahun 2008, 2009, dan 2010 masih diatas 80%, karena pada rasio ini semakin kecil perbandingan maka semakin besar skor yang didapat.

c. Rasio Efisiensi Pelayanan

Tahun	Nilai	Bobot	Skor
2006	75	2%	1,5
2007	75	2%	1,5
2008	75	2%	1,5
2009	75	2%	1,5
2010	75	2%	1,5

Sumber : Data Keuangan Koperasi KPRI Dishub dan LLAJ

Dapat dilihat pada tabel diatas memberikan gambaran secara jelas bahwa tidak adanya perbedaan antara sebelum, pada saat, dan sesudah pemberian CSR. Hal ini dikarenakan perbandingan antara biaya karyawan dengan volume pinjaman masih diatas 5%.

5. Rasio Likuiditas

a. Rasio Kas

Tahun	Nilai	Bobot	Skor
2006	25	10%	2,5
2007	25	10%	2,5
2008	25	10%	2,5
2009	25	10%	2,5
2010	25	10%	2,5

Sumber : Data Keuangan Koperasi KPRI Dishub dan LLAJ

Dapat dilihat pada tabel diatas memberikan gambaran secara jelas bahwa tidak adanya perbedaan antara sebelum, pada saat, dan sesudah pemberian CSR. Hal ini dikarenakan perbandingan antara kas + bank dengan kewajiban lancar diatas 80%. Pada rasio ini semakin besar perbandingan maka semakin besar skor yang diperoleh.

b. Rasio Pinjaman yang Diberikan Terhadap Dana yang Diterima

Tahun	Nilai	Bobot	Skor
2006	100	5%	5
2007	100	5%	5
2008	100	5%	5
2009	100	5%	5
2010	100	5%	5

Sumber : Data Keuangan Koperasi KPRI Dishub dan LLAJ

Dapat dilihat pada tabel diatas memberikan gambaran secara jelas

bahwa tidak adanya perbedaan antara sebelum, pada saat, dan sesudah pemberian CSR. Hal ini dikarenakan perbandingan antara pinjaman yang diberikan dengan dana yang diterima lebih dari 80% dan merupakan skor tertinggi.

6. Rasio Kemandirian dan Pertumbuhan

a. Rentabilitas Asset

Tahun	Nilai	Bobot	Skor
2006	50	3%	1,5
2007	50	3%	1,5
2008	50	3%	1,5
2009	50	3%	1,5
2010	50	3%	1,5

Sumber : Data Keuangan Koperasi KPRI Dishub dan LLAJ

Dapat dilihat pada tabel diatas memberikan gambaran secara jelas bahwa tidak adanya perbedaan antara sebelum, pada saat, dan sesudah pemberian CSR. Hal ini dikarenakan perbandingan antara SHU sebelum pajak dengan total asset masih cukup rendah.

b. Rentabilitas Modal Sendiri

Tahun	Nilai	Bobot	Skor
2006	25	3%	0,75
2007	25	3%	0,75
2008	25	3%	0,75
2009	25	3%	0,75
2010	25	3%	0,75

Sumber : Data Keuangan Koperasi KPRI Dishub dan LLAJ

Dapat dilihat pada tabel diatas memberikan gambaran secara jelas bahwa tidak adanya perbedaan antara sebelum, pada saat, dan sesudah pemberian CSR. Hal ini dikarenakan perbandingan antara SHU bagian anggota dengan total modal sendiri

sangat rendah, dan total modal sendiri lebih besar daripada SHU bagian anggota. Skor yang didapat pada rasio ini merupakan skor terendah.

c. Kemandirian Operasional Pelayanan

Tahun	Nilai	Bobot	Skor
2006	100	4%	4
2007	100	4%	4
2008	100	4%	4
2009	100	4%	4
2010	100	4%	4

Sumber : Data Keuangan Koperasi KPRI Dishub dan LLAJ

Dapat dilihat pada tabel diatas memberikan gambaran secara jelas bahwa tidak adanya perbedaan antara sebelum, pada saat, dan sesudah pemberian CSR. Hal ini dikarenakan perbandingan antara partisipasi netto dengan beban usaha + beban koperasi diatas 100% sehingga mendapat skor tinggi.

7. Jatidiri Koperasi

a. Rasio Partisipasi Bruto

Tahun	Nilai	Bobot	Skor
2006	100	7%	7
2007	100	7%	7
2008	100	7%	7
2009	100	7%	7
2010	100	7%	7

Sumber : Data Keuangan Koperasi KPRI Dishub dan LLAJ

Dapat dilihat pada tabel diatas memberikan gambaran secara jelas bahwa tidak adanya perbedaan antara sebelum, pada saat, dan sesudah pemberian CSR. Hal ini dikarenakan perbandingan antara partisipasi bruto dengan partisipasi bruto + pendapatan

lain-lain diatas 90% sehingga mendapat skor yang tinggi.

b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota

Tahun	Nilai	Bobot	Skor
2006	0	7%	7
2007	0	7%	7
2008	0	7%	7
2009	0	7%	7
2010	0	7%	7

Sumber : Data Keuangan Koperasi KPRI Dishub dan LLAJ

Dapat dilihat pada tabel diatas memberikan gambaran secara jelas bahwa tidak adanya perbedaan antara sebelum, pada saat, dan sesudah pemberian CSR. Hal ini dikarenakan perbandingan antara PEA dengan simpanan pokok + simpanan wajib masih dibawah 5% sehingga mendapatkan skor yang rendah.

8. Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan USP Koperasi

No.	Aspek	Tahun				
		2006	2007	2008	2009	2010
1	Permodalan	10,5	10,5	12	12	12
2	Kualitas Aktiva Produktif	25	25	25	25	25
3	Manajemen	11,25	11,25	11,25	12	12
4	Efisiensi	9,5	6,5	6,5	6,5	6,5
5	Likuiditas	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
6	Kemandirian dan Pertumbuhan	6,25	6,25	6,25	6,25	6,25
7	Jatidiri Koperasi	7	7	7	7	7
Total Skor		77,0	74,0	75,5	76,3	76,3
Predikat		Cukup Sehat				

Dalam tabel diatas skor secara keseluruhan menunjukkan bahwa

tidak terdapat perbedaan predikat antara sebelum, pada saat, dan sesudah pemberian CSR, yaitu dengan predikat “Cukup Sehat”.

HASIL PEMBAHASAN

A. Tingkat Kesehatan Koperasi

Adapun penjelasan setiap komponen tingkat kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Aspek Permodalan

Salah satu faktor yang menyebabkan tingginya rasio permodalan ini adalah penggunaan sistem potong gaji yang diterapkan dalam KPRI Dinas Perhubungan dan LLAJ Surabaya. Dengan adanya sistem ini mengharuskan para anggota koperasi membayar pinjaman pada koperasi dengan langsung memotong gaji bulanan anggota. Sistem ini membuat KPRI Dinas Perhubungan dan LLAJ Surabaya bebas dari pinjaman berisiko. Dengan demikian tampak bahwa kondisi permodalan koperasi pada sebelum pemberian CSR yaitu tahun 2006 dan 2007, berada dalam kondisi yang cukup sehat, pada saat pemberian CSR tahun 2008 dan sesudah pemberian CSR tahun 2009 dan 2010 berada dalam kondisi yang sehat berdasarkan standar yang ditetapkan dengan melihat perolehan skor tertinggi pada masing-masing rasio yang dibandingkan pada aspek permodalan.

2. Aspek Kualitas Aktiva Produktif

Salah satu faktor yang menyebabkan tingginya rasio kualitas aktiva produktif ini adalah penggunaan sistem potong gaji yang diterapkan dalam KPRI Dinas Perhubungan dan LLAJ Surabaya. Dengan adanya sistem ini mengharuskan para anggota koperasi membayar pinjaman pada koperasi dengan langsung memotong gaji bulanan anggota. Sistem ini membuat KPRI Dinas Perhubungan dan LLAJ Surabaya bebas dari pinjaman berisiko dan pinjaman bermasalah. Dengan demikian tampak bahwa kondisi kualitas aktiva produktif koperasi pada sebelum pemberian CSR yaitu tahun 2006 dan 2007, pada saat pemberian CSR tahun 2008 dan sesudah pemberian CSR tahun 2009 dan 2010 berada dalam kondisi yang

sehat berdasarkan standar yang ditetapkan dengan melihat skor tertinggi pada masing-masing rasio yang dibandingkan pada aspek kualitas aktiva produktif.

3. Aspek Manajemen

Untuk aspek manajemen umum tahun 2006 sampai dengan 2008 diperoleh skor 2,25 yang berarti manajemen koperasi secara umum dapat dinilai baik karena terdapat kesesuaian antara tujuan yang hendak dicapai koperasi dengan rencana tertulis serta bagaimana pemisahan tanggungjawab sesuai dengan *jobdesk* masing-masing jabatan, dibuktikan dengan adanya Anggaran Dasar Koperasi yang ada. Namun pada manajemen umum ini KPRI Dinas Perhubungan dan LLAJ Surabaya masih belum memiliki rencana strategis untuk jangka waktu 3 tahun ke depan karena perputaran kredit setiap periodenya tidak mengalami perubahan. Untuk tahun 2009 dan 2010 diperoleh skor 3. Kenaikan skor ini dikarenakan KPRI Dinas Perhubungan dan LLAJ Surabaya sudah memiliki rencana strategis untuk jangka waktu 3 tahun ke depan karena tambahan modal dari CSR pada tahun 2008 menambah perputaran kredit pada periode 2009 dan 2010, dan sisa dari tambahan modal CSR digunakan untuk perencanaan untuk jangka waktu 3 tahun ke depan.

4. Aspek Efisiensi

Pada sebelum pemberian CSR tahun 2006, rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto memperoleh skor tertinggi, yaitu sebesar 4. Sedangkan untuk tahun 2007, pada saat pemberian CSR tahun 2008 dan pada sesudah pemberian CSR tahun 2009 dan 2010 rasio ini mengalami penurunan skor menjadi 1. Peningkatan dan penurunan rasio tersebut karena beban usaha pada koperasi bertambah besar tiap tahunnya. Sedangkan untuk rasio efisiensi pelayanan pada sebelum pemberian maupun pada sesudah pemberian CSR yaitu tahun 2006 sampai dengan 2010 memperoleh skor 1,5. Dengan demikian tampak bahwa kondisi efisiensi koperasi pada sebelum pemberian

CSR tahun 2006 berada dalam kondisi efisien. Tahun 2007, sama dengan pada saat dan sesudah pemberian CSR tahun 2008 sampai 2010 yaitu berada dalam kondisi cukup efisien karena peningkatan dan penurunan rasio yang tidak terlalu signifikan.

5. Aspek Likuiditas

Untuk rasio kas dan bank terhadap kewajiban lancar pada sebelum pemberian CSR tahun 2006 dan 2007, pada saat pemberian CSR tahun 2008 dan sesudah pemberian CSR tahun 2009 dan 2010 sama-sama memperoleh skor 2,5. Untuk rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima pada sebelum pemberian CSR tahun 2006 dan 2007, pada saat pemberian CSR tahun 2008 dan sesudah pemberian CSR tahun 2009 dan 2010 memperoleh skor sebesar 5 tidak ada peningkatan skor. Dengan demikian dapat dikatakan tingkat likuiditas pada sebelum pemberian CSR tahun 2006 dan 2007, pada saat pemberian CSR tahun 2008 dan sesudah pemberian CSR tahun 2009 dan 2010 dalam kondisi likuid berdasarkan standar yang ditetapkan.

6. Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan

Untuk rasio rentabilitas asset tahun 2006 sampai dengan 2010 mendapatkan skor rendah, yaitu 1,5. Hal ini disebabkan karena kecilnya SHU sebelum pajak bila dibandingkan dengan total asset. Untuk rasio rentabilitas modal sendiri baik tahun 2006 sampai dengan 2010 mendapatkan skor terendah, yaitu 0,75. Hal ini disebabkan karena kecilnya SHU bagian anggota (40% dari SHU setelah pajak) bila dibandingkan dengan total modal sendiri. Sedangkan untuk rasio kemandirian operasional pelayanan tahun 2006 sampai dengan 2010 mendapatkan skor tertinggi, yaitu 4%. Hal ini disebabkan karena partisipasi netto pada koperasi lebih besar dibandingkan dengan beban usaha + beban perkoperasian sehingga memperoleh rasio yang sangat besar. Dengan demikian dapat dikatakan tingkat kemandirian koperasi pada sebelum pemberian CSR tahun 2006

dan 2007, pada saat pemberian CSR tahun 2008 dan sesudah pemberian CSR tahun 2009 dan 2010 adalah sangat mandiri dengan dengan perolehan skor cukup tinggi sebesar 7,5.

7. Aspek Jatidiri Koperasi

Pihak koperasi belum menerapkan Laporan Promosi Ekonomi Anggota. Hal ini disebabkan adanya kendala dalam membandingkan harga-harga barang yang dijual di koperasi dengan harga barang yang dijual di pasaran luar. Jumlah item barang yang cukup banyak merupakan salah satu kendala pembuatan Laporan promosi Ekonomi Anggota.

Satu hal yang mempengaruhi penilaian terhadap kesehatan koperasi ini adalah KPRI Dinas Perhubungan dan LLAJ Surabaya belum menggunakan Laporan Promosi Ekonomi Anggota karena pihak koperasi menilai terlalu banyak item yang dibandingkan antara harga pada barang yang dijual di koperasi dengan harga barang yang dijual di pasaran luar. Dengan tidak adanya Laporan PEA inilah menyebabkan semakin kecilnya rasio yang diperoleh.

B. CSR Yang Diperoleh Koperasi

CSR pada KPRI Dinas Perhubungan dan LLAJ Surabaya diperoleh pada tahun 2008. CSR yang diperoleh berupa bantuan modal dari bank Bukopin yaitu dana pinjaman dengan bunga yang rendah. Pinjaman yang diterima koperasi sebesar Rp. 50.000.000 ini diakui oleh koperasi sebagai hutang jangka panjang, karena pemberian modal tersebut akan dikembalikan oleh koperasi dengan jangka waktu yang lebih dari 1 tahun yaitu dengan jangka waktu 24 bulan.

CSR tersebut dimanfaatkan oleh KPRI Dinas Perhubungan dan LLAJ Surabaya sebagai tambahan perputaran kredit, dimana setiap anggota koperasi mendapatkan tambahan pinjaman. Tambahan pinjaman tersebut adalah yang awalnya anggota koperasi hanya bisa meminjam sesuai dengan standart pinjaman, tetapi setelah adanya CSR anggota koperasi bisa meminjam lebih dari

standart pinjaman. Namun pinjaman kredit KPRI Dinas Perhubungan dan LLAJ Surabaya tidak diberikan pada sembarang anggota, pinjaman kredit yang lebih dari standart ini hanya diberikan pada anggota yang memiliki pembayaran lancar. Dengan anggota yang memiliki pembayaran lancar maka akan memudahkan koperasi untuk mengembalikan hutang jangka panjangnya.

C. Dampak CSR Terhadap Tingkat Kesehatan Koperasi

Secara keseluruhan keberadaan CSR terhadap kesehatan KPRI Dinas Perhubungan dan LLAJ Surabaya tidak menimbulkan dampak. Hal ini dikarenakan predikat sebelum, pada saat, dan sesudah pemberian CSR adalah Cukup Sehat dengan skor $60 \leq x < 80$. Namun total skor tingkat kesehatan koperasi antara sebelum, pada saat, dan sesudah pemberian CSR terdapat peningkatan sebesar 1,5%, yaitu dari 74% ditahun 2007 menjadi 75,5% ditahun 2008.

Terdapat dua aspek yang berpengaruh dalam pemberian CSR terhadap rasio kesehatan koperasi yaitu aspek permodalan dan aspek manajemen. Pada aspek permodalan terdapat peningkatan sebesar 1,5%, yaitu dari 10,5% ditahun 2006 dan 2007 sebelum pemberian CSR dan meningkat 12% pada tahun 2008 sampai dengan 2010 pada saat dan sesudah pemberian CSR. Aspek permodalan meliputi rasio modal sendiri terhadap total aset, rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko dan rasio kecukupan modal sendiri. Dampak CSR terdapat pada rasio modal sendiri terhadap total aset yaitu peningkatan skor dari 1,5% pada sebelum pemberian CSR menjadi 3% pada saat dan sesudah pemberian CSR. Dalam hal ini dapat dilihat pada SHU koperasi yang semakin naik sebesar Rp. 2.032.948 dari tahun 2007 dan 2008 menjadi Rp. 3.471.524 ditahun 2009.

Pengaruh CSR terhadap manajemen koperasi adalah adanya peningkatan skor dari 11,25 pada sebelum dan saat CSR yaitu tahun 2006 sampai dengan 2008

menjadi 12 pada sesudah pemberian CSR yaitu tahun 2009 dan 2010. Aspek manajemen koperasi meliputi manajemen umum, kelembagaan, permodalan, aktiva dan likuiditas. Pengaruh CSR terhadap aspek manajemen koperasi terdapat pada aspek manajemen umum, yaitu peningkatan skor dari 2,25 pada sebelum CSR menjadi 3,0 pada sesudah CSR.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Surabaya sebelum pemberian CSR dan sesudah pemberian CSR. Dengan pengujian deskriptif kuantitatif yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara keseluruhan komponen dan berdasarkan predikat tingkat kesehatan dampak CSR terhadap tingkat kesehatan KPRI Dinas Perhubungan dan LLAJ Surabaya adalah tidak memiliki dampak karena baik sebelum maupun sesudah pemberian CSR tingkat kesehatan koperasi berada pada predikat "Cukup Sehat". Namun berdasarkan perhitungan tingkat kesehatan terdapat peningkatan skor rasio tingkat kesehatan yaitu pada rasio permodalan sebesar 1,5% dan rasio manajemen sebesar 0,75%, peningkatan ini terjadi setelah adanya pemberian CSR.
2. Dampak pemberian CSR terhadap tingkat kesehatan KPRI Dinas Perhubungan dan LLAJ Surabaya dapat diketahui dari adanya peningkatan rasio permodalan yaitu pada rasio modal sendiri terhadap total aset dapat dilihat pada SHU koperasi yang semakin naik, dan pada rasio manajemen yaitu pada perencanaan kerja jangka panjang setelah adanya pemberian CSR.

SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka peneliti memberikan saran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi koperasi, pemberi CSR, dan bagi peneliti selanjutnya yaitu :

1. Bagi KPRI Dinas Perhubungan dan LLAJ Surabaya, agar hutang yang didapat dicatat sebesar harga perolehan sebesar Rp.50.000.000 dan beban dari hutang dicatat sebagai laba rugi. Selain itu dibuat program bantuan CSR secara berkelanjutan misalnya dalam 1 tahun terdapat 2 kali atau 3 kali sehingga dapat meningkatkan permodalan dan Sisa Hasil Usaha (SHU) yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan anggota maupun tingkat kesehatan koperasi.
2. Bagi Pemberi Modal (CSR), agar jumlah pemberian modal CSR ditentukan oleh jumlah anggota koperasi dan tingkat kesehatan koperasi.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya, agar dikaji besaran pemberian CSR sehingga menyebabkan adanya perubahan predikat tingkat kesehatan koperasi.

DAFTAR RUJUKAN

- Arifin Sitio, Halomoan Tamba. 2001. "Koperasi Teori dan Praktik". Erlangga. Jakarta.
- Departemen Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil 1997/1998. *Ukuran Keberhasilan Koperasi*.
- Henrojogi. 2002. *Koperasi Azaz-Azaz, Teori dan Praktek*. Penerbit Rajawali Press. Jakarta.
- Idris, A. R. 2005. "Corporate Social Responsibility (CSR) Sebuah Gagasan dan Implementasi". <http://www.fajar.co.id/news.php?newsid=13092> [23 Mei 2012].
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2002. *Standar Akuntansi Keuangan*. Salemba Empat. Jakarta.
- Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-236/MBU/2003. *Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan*. Jakarta.
- Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 96/Kep/M.KUKM/IX/2004. *Tentang Pedoman Standar Operasional Manajemen Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi*.
- Kompas. 21 Juli 2007. "Pemerintah Diharapkan Lebih Bijak Atur CSR". *Kompas*: 1 dan 15.
- Munawaroh, Maidatul. "Perancangan Model Pengukuran Kinerja CSR Pada Pengembangan Bisnis UKM dari PT. YTL Jawa Timur." (Online), (<http://digilib.its.ac.id/public/ITS-Undergraduate-15533-Paper-pdf.pdf>, diakses 27 Juli 2012).
- Nursahid, F. 2006. "Praktik Kedermawanan Sosial BUMN: Analisis Terhadap Model Kedermawanan PT. Krakatau Steel, PT. Pertamina dan PT. Telekomunikasi Indonesia". *Jurnal Filontropi dan Masyarakat Madani*, 1: 5-21.
- Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009. *Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi*. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995. *Tentang Pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam Oleh Koperasi*.
- Pujiyanti, Sri, dan Suhendra, Susi. "Analisis Kinerja Keuangan

- Mengenai Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Metode Camel (Studi Kasus pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dan PT. Bank Bukopin Tbk Periode 2006-2008).” (Online), (http://www.gunadarma.ac.id/library/articles/graduate/economy/2009/Artikel_21205185.pdf, diakses 27 Juli 2012).
- Purniyanti, Sri. “Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Unit Desa (Studi Kasus Pada KUD di Kabupaten Semarang).” (Online), (http://uap.unnes.ac.id/.../analisis_tingkat_kesehatan_kop_3352401048.doc, diakses 27 Juli 2012).
- Robbins, S. P dan M. Coulter. 2004. *Manajemen*. Hermaya dan Slamet [penerjemah]. Indeks Group Gramedia, Jakarta.
- Situs PKBL BUMN. 2011. Tentang PKBL. (<http://pkbl.bumn.go.id/index/profil/id/1>, diakses 2 Agustus 2012.)
- Solihin, I. 2009. *Corporate Social Responsibility : from charity to sustainability*. Salemba Empat, Jakarta.
- Sumarsono. 2003. *Manajemen Koperasi Teori dan Praktek*. Edisi Pertama. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Surakhmad, Winarno. 1990. “Pengantar Penelitian Ilmiah”. Tarsito. Bandung.
- Tatik Suryani, Sri Lestari, Wiwik Lestari. 2008. “Manajemen Koperasi : Teknik Penyusunan Laporan Keuangan, Pelayanan Prima dan Pengelolaan SDM”. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- UU Nomor 12 tahun 1967 *Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian*.
- UU Nomor 25 tahun 1992 *Tentang Perkoperasian*.
- UU Nomor 40 tahun 2007 *Tentang Perseroan Terbatas*.
- UUD 1945 Pasal 33 *Tentang Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial*.
- Wibisono. Yusuf. 2007. *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility)*. Gresik : Fascho Publishing.
- Yin, Robert K. 2002. *Studi Kasus Desain dan Metode*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

